

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENTANG AKSESIBILITAS UMUM ANGGARAN BAGI PENDUDUK KURANG MAMPU DI KOTA MALANG



Oleh: TOHA LUQONI (09210010)

Social Welfare

Dibuat: 2010-10-27 , dengan 7 file(s).

Keywords: efektifitas kebijakan pendidikan, aksesibilitas anggaran

ABSTRAKSI

Tujuan Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana efektifitas kebijakan pendidikan yang telah di buat oleh pemerintah Kota Malang di implimentasikan, terutama kebijakan yang berhubungan dengan aksesibiitas anggaran. Apakah pemerataan akses anggaran bisa merata dan mampu diserap oleh pendduduk kurang mampu?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, dalam metode penelitian sosial, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami gejala yang terbatas dengan fokus yang mendalam dan rinci serta mempersoalkan sesuatu yang di teliti menurut pandangan dan definisi partisipatif (Faisal, 1990) Adapun yang dijadikan sumberdata dalam penelitian ini adalah orang yang menjadi praktisi pendidikan, pegawai Dinas pendidikan, dokumen kebijakan dan data fisik fasilitas pendidikan. Analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif kualitatif sedang instrument pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan Fakta bahwa, banyak kebijakan pendidikan di kota Malang pada tingkatan implementasi menimbulkan persoalan serius. Bukan saja tidak berhasil tetapi justru pada titik tertentu menimbulkan persoalan baru. Seharusnya pendidikan adalah sarana untuk menghilangkan sekat dan kesenjangan sosial dalam masyarakat akan tetapi itu tidak berlaku di kota Malang, justru kebijakan pendidikan di di Kota Malang malah menciptakan embrio strata baru dengan munculnya beberapa pilihan model status pendidikan, kebijakan pendidikan yang melegalkan status pendidikan seperti Sekolah Berstandart Internasional (SBI), Sekolah Berstandart Nasional (SSN), sekolah Akselarasi dan sekolah yang berstrata Reguler. Yang ujung ujungnya adalah pendiskriditan bagi orang miskin karena hanya mereka yang mempunyai status ekonomi menengah keatas yang mampu menikmati pendidikan dengan fasilitas mewah dengan sekolah berstatus Internasional. Setidaknya ini telah berjalan dalam implimentasi kebijakan pendidikan di Kota Malang.